1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

    1. Inflasi bulan April 2026 tercatat 0,02% secara bulanan (mtm) dan 2,85% secara tahunan (yoy). Inflasi mtm lebih rendah dibandingkan Maret 2026 akibat normalisasi permintaan pasca Ramadhan dan HBKN Idulfitri 1447H di tengah kecukupan pasokan bahan pokok strategis pasca musim panen.
    2. Inflasi bulan Mei 2026 tercatat 0,28% secara bulanan (mtm) dan 3,49% secara tahunan (yoy). Inflasi mtm lebih tinggi dibandingkan April 2026 akibat kenaikan harga avtur dan pangan strategis seiring dengan peningkatan harga acuan global dan biaya kemasan, serta gangguan produksi pangan strategis khususnya komoditas hortikultura akibat pengaruh cuaca.
    3. Pada Juni 2026, inflasi Jawa Timur relatif terkendali di tengah peningkatan mobilitas masyarakat dan pengaruh fluktuasi cuaca. Inflasi tercatat sebesar 0,30% (mtm). Inflasi mtm lebih tinggi dibandingkan Mei 2026 akibat kenaikan harga BBM non-subsidi pada awal Juni 2026 dan gangguan produksi komoditas hortikultura serta pangan akibat pengaruh cuaca. Secara tahunan, inflasi tercatat sebesar 3,36% (yoy) lebih rendah dibandingkan Mei 2026 disebabkan kenaikan harga emas perhiasan, tarif angkutan udara akibat kenaikan harga avtur, serta kenaikan harga komoditas strategis seiring masih berlanjutnya konflik geopolitik yang mendorong kenaikan harga energi beserta turunannya. Inflasi Jawa Timur mtm lebih rendah dibandingkan nasional (0,44%; mtm), namun inflasi yoy lebih tinggi dibandingkan nasional (3,34%; yoy). Inflasi yoy tertinggi terjadi di Sumenep (4,48%) dengan IHK sebesar 116,19 sedangkan terendah terjadi di Tulungagung (2,57%) dengan IHK sebesar 112,34.
    4. Pada Juni 2026 secara bulanan, kelompok Transportasi mengalami inflasi 0,88% (mtm) dengan andil 0,11% terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga bensin (andil 0,17%) serta angkutan udara. Selanjutnya, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami inflasi 0,28% (mtm) dengan andil 0,02% terutama dipengaruhi oleh emas perhiasan (andil 0,01%). Sedangkan kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami deflasi sebesar -0,35% (mtm) dengan andil -0,11% terutama dipengaruhi oleh komoditas strategis a.l. daging ayam ras (andil -0,11%), telur ayam ras (-0,02%) serta cabai merah (-0,01%). Di sisi lain, komoditas strategis yang masih mengalami inflasi a.l. bawang merah dan bawang putih (masing-masing andil 0,04%) dan beras (0,03%).
    5. IHK bulanan Jawa Timur Juli 2026 diprakirakan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Juni 2026. Hal ini akibat mulai berlangsungnya panen sejumlah komoditas hortikultura serta penurunan harga BBM non-subsidi. Meskipun demikian, risiko inflasi masih perlu diwaspadai pada komoditas hortikultura akibat faktor cuaca serta dampak rambatan kenaikan harga energi dan komoditas global di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Prospek inflasi Jawa Timur tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1%.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

    Pada Triwulan II-2026, permasalahan sd. Juni 2026 antara lain:

    1. Fluktuasi harga pangan strategis dan tekanan biaya energi. Harga beberapa komoditas pangan strategis masih menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi. Di sisi lain, kenaikan harga BBM non-subsidi memberi tekanan pada kelompok transportasi dan berpotensi menimbulkan dampak lanjutan terhadap biaya distribusi maupun harga berbagai

komoditas.
2. Risiko gangguan produksi dan pasokan pangan akibat faktor cuaca khususnya komoditas hortikultura. Risiko perlu diantisipasi pada Semester II-2026 seiring potensi El Nino dan musim kemarau yang diprakirakan lebih panjang pada sebagian sentra produksi Jawa Timur yang berpotensi menyebabkan penurunan produksi, gangguan pasokan, dan peningkatan volatilitas harga pangan.
3. Konektivitas dan distribusi antarwilayah masih menjadi tantangan. Kelancaran distribusi komoditas pangan belum sepenuhnya optimal di seluruh wilayah Jawa Timur. Salah satu contoh adalah Kabupaten Sumenep, di mana tantangan konektivitas dan distribusi pasokan turut memengaruhi kenaikan harga beras.
4. Tingginya risiko *imported inflation*. Perkembangan harga komoditas global, khususnya energi dan komoditas non-energi seperti emas, masih menjadi sumber tekanan eksternal. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga energi global yang selanjutnya dapat ditransmisikan ke harga domestik. Selain itu, kenaikan harga BBM non-subsidi domestik berpotensi memberikan tekanan lanjutan terhadap berbagai kelompok pengeluaran.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Keterjangkauan Harga

1. Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah dilaksanakan lebih dari 66 kali pada TW II-2026 di 9 Kab/Kota, antara lain Madiun, Situbondo, Surabaya, Bojonegoro, Jember, Probolinggo, Mojokerto dan Jombang, dengan komoditas utama cabai, bawang merah, beras dan minyak goreng;
2. Sidak pasar oleh Satgas Pangan dilaksanakan di Kota Kediri, Surabaya dan Bojonegoro untuk memastikan harga komoditas strategis sesuai HET, serta sidak LPG 3 kg di 31 kecamatan di Jember untuk menjaga stabilitas harga energi.

Ketersediaan Pasokan

1. Vaksinasi PMK dan LSD dilakukan untuk menjaga ketersediaan ternak kurban dan mendukung pasokan antarwilayah;
2. Pemantauan pangkalan LPG dilakukan guna memastikan stabilitas pasokan energi;
3. Program pompanisasi dan penerapan APH di Lamongan untuk meningkatkan produksi pangan;
4. Optimalisasi cadangan pangan melalui penyerapan hasil panen; hingga pertengahan Mei 2026 serapan beras mencapai 719 ribu ton (81,40% target), dengan stok sekitar 1,3 juta ton yang diperkirakan memenuhi kebutuhan hingga 16 bulan;
5. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan melalui 113 program, terdiri dari 96 on-farm dan 17 off-farm;
6. Gerakan Panen dan Percepatan Tanam di Madiun untuk menjaga kesinambungan pasokan dan ketahanan pangan;
7. Panen raya jagung di Tuban untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, mendukung ekspor dan menjaga pasokan bahan baku pakan;
8. Produksi gula kristal putih mencapai 1,3 juta ton atau 51% produksi nasional;
9. Pemeriksaan kesehatan dan post mortem hewan kurban untuk menjamin ketersediaan daging yang ASUH;
10. Produksi padi Januari–Juli 2026 berpotensi mencapai 7,71 juta ton GKG, meningkat 5,49% (yoy);

Bantuan pangan Bulog Jatim disalurkan kepada 5,6 juta penerima manfaat. Distribusi beras SPHP hingga Juni mencapai 65,6 ribu ton atau 66% target;

12. Peningkatan produktivitas tebu melalui panen dan tanam bongkar ratoon di Malang untuk memperkuat pasokan gula.

Kelancaran Distribusi

1. Kerja sama intra-provinsi Ngawi–Pacitan untuk pasokan beras, telur ayam ras, daging ayam ras dan tomat;
2. Penguatan kelancaran logistik melalui entri data kapal di 4 pelabuhan, antara lain DABN, Gili Ketapang, Paciran dan Trenggalek;
3. Penguatan distribusi Minyakita oleh Bulog Jatim hingga 900 ribu liter;
4. Pemeliharaan jalan Ponco–Jatirogo (Bts. Jateng) di Tuban untuk menjaga kelancaran arus barang dan efisiensi rantai pasok;
5. Perbaikan 82 ruas jalan strategis di Ponorogo, pengoperasian fasilitas pengemasan minyak goreng PTPN IV PalmCo di Surabaya, serta rekayasa lalu lintas selama perbaikan Jembatan Kaliombo Kediri untuk menjaga kelancaran distribusi.

Komunikasi Efektif

1. Rakor Kemendagri dengan seluruh Kab/Kota Jatim terkait pengendalian inflasi;
2. Arahan Gubernur Jatim dalam mitigasi dampak kemarau terhadap pertanian;
3. Komunikasi publik terkait penyaluran bantuan BBM kepada pengemudi ojek online;
4. Rakor penanganan dampak hidrometeorologi dan potensi kemarau panjang 2026;
5. Rakor TPID dan Forum Investasi se-Jatim untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
6. HLM TPID, TP2ED dan TPAKD Bangkalan untuk menyelaraskan langkah pengendalian inflasi lintas sektor;
7. Pelaksanaan GPIPS dan Rakor TPID-TPIP Wilayah Jawa;
8. Publikasi Buletin Harga Pangan berdasarkan data SISKAPERBAPO Jatim;
9. Edukasi publik mengenai ketersediaan pasokan pangan menjelang HBKN Iduladha

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi Jawa Timur pada Triwulan II-2026 secara umum berjalan efektif dan memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas harga. Hal tersebut tercermin dari inflasi Jawa Timur Juni 2026 sebesar 0,30% (mtm) dan 3,36% (yoy), masih berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Pengendalian inflasi dilaksanakan melalui strategi 4K yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

- Keterjangkauan Harga

Pelaksanaan Operasi Pasar/Gerakan Pangan Murah lebih dari 66 kali di 9 Kab/Kota serta sidak pasar oleh Satgas Pangan berkontribusi menjaga keterjangkauan harga dan mengantisipasi gejolak harga komoditas strategis. Kebijakan tersebut relatif efektif, tercermin dari deflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 0,35% (mtm), terutama karena melimpahnya pasokan cabai dan beberapa komoditas pangan. Namun demikian, masih terdapat kenaikan harga bawang merah 9,47%, bawang putih 11,33%, beras 0,67% dan wortel 27,95% (mtm), sehingga intervensi harga perlu lebih diarahkan pada komoditas yang

mengalami tekanan.

- Ketersediaan Pasokan

Kebijakan peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan, bantuan pangan dan SPHP menunjukkan hasil positif. Produksi padi Januari–Juli 2026 diproyeksikan mencapai 7,71 juta ton GKG atau meningkat 5,49% (yoy), sementara distribusi beras SPHP mencapai 65,6 ribu ton atau sekitar 66% target. Program produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan, vaksinasi ternak, serta penguatan produksi tebu turut mendukung ketahanan pangan. Meskipun demikian, keberlanjutan pasokan masih menghadapi risiko cuaca, potensi El Nino dan musim kemarau pada Semester II 2026 sehingga diperlukan langkah antisipatif sejak dini.

- Kelancaran Distribusi

Penguatan konektivitas dan rantai pasok melalui perbaikan 82 ruas jalan di Ponorogo, fasilitas pengemasan minyak goreng di Surabaya, rekayasa lalu lintas Jembatan Kaliombo serta kerja sama pasokan antarwilayah telah mendukung kelancaran distribusi. Namun, tantangan konektivitas masih terdapat di wilayah tertentu, khususnya Kabupaten Sumenep, yang turut memengaruhi harga beras. Oleh karena itu, penguatan kerja sama pasokan antarwilayah dan efisiensi logistik perlu terus ditingkatkan.

- Komunikasi Efektif

Koordinasi TPID Jawa Timur, Satgas Pangan, HLM, publikasi Buletin Harga Pangan, penguatan kelembagaan korporasi petani dan integrasi informasi harga telah memperkuat respons pengendalian inflasi. Kesepakatan penyerapan telur peternak lokal melalui SPPG dengan harga acuan minimal Rp24.000/kg juga menunjukkan bahwa koordinasi dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen. Ke depan, integrasi data harga, pasokan dan distribusi perlu semakin diperkuat agar kebijakan lebih cepat, tepat sasaran dan antisipatif.

Secara keseluruhan, kebijakan pengendalian inflasi pada TW II-2026 dinilai efektif dalam menjaga inflasi Jawa Timur tetap dalam sasaran, didukung oleh penguatan ketahanan pangan, intervensi harga, distribusi dan koordinasi lintas sektor. Namun, efektivitas tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat untuk menghadapi risiko Semester II 2026, terutama potensi gangguan produksi akibat El Nino dan kemarau, kenaikan harga energi domestik, serta imported inflation akibat dinamika harga komoditas global dan geopolitik

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk mendukung terkendalinya inflasi Jawa Timur tahun 2026, sinergi dan koodinasi yang kolaboratif antara TPID Provinsi Jawa Timur, Bank Indonesia, TPIP serta *stakeholder* lainnya terus diintensifkan. TPID Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi yang terintegrasi dengan strategi 4K dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2027 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/364-021/013/2025 tanggal 29 Oktober 2025. Sejalan dengan isu dan tantangan terkini guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian inflasi, beberapa rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi yang digagas antara lain:

1. Pada aspek keterjangkauan harga, memperkuat stabilisasi harga komoditas strategis

melalui pasar murah secara lebih terarah dengan memprioritaskan wilayah yang mengalami tekanan inflasi dan komoditas penyumbang utama inflasi, seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai dan bawang. Optimalisasi EPIK Mobile perlu didukung peningkatan frekuensi dan penyempurnaan distribusi serta sinergi dengan Perum Bulog, BUMD pangan dan pelaku usaha, khususnya menjelang HBKN, untuk menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat;

2. Pada aspek ketersediaan pasokan, memperkuat kesinambungan pasokan pangan strategis melalui peningkatan produktivitas, pengembangan korporasi petani, perluasan gerakan tanam, penguatan cadangan pangan pemerintah serta peningkatan produktivitas hortikultura dan peternakan. Keberlanjutan produksi didukung penggunaan benih unggul, modernisasi pertanian dan pembangunan irigasi. Mitigasi risiko perubahan iklim perlu diperkuat melalui penyediaan sarana produksi pertanian, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan sistem peringatan dini terhadap potensi gangguan produksi. Penyerapan hasil produksi, bantuan pangan dan SPHP perlu terus dioptimalkan;
3. Pada aspek kelancaran distribusi, mengoptimalkan distribusi komoditas strategis melalui penguatan konektivitas antarwilayah, efisiensi logistik, rantai pasok dan jaringan distribusi, termasuk optimalisasi armada logistik pemerintah dan swasta. Kerja sama antardaerah (KAD) perlu diperkuat untuk menjamin pasokan dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan. Risiko gangguan distribusi akibat dinamika geopolitik dan kenaikan harga energi perlu diantisipasi melalui penguatan cadangan energi, koordinasi dengan pelaku distribusi dan pemantauan biaya logistik guna meminimalkan dampaknya terhadap harga barang;
4. Selanjutnya, pada aspek komunikasi efektif, memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan melalui integrasi data dan digitalisasi pengendalian inflasi, termasuk optimalisasi SISKAPERBAPO sebagai dashboard monitoring harga yang didukung analisis spasial dan sistem peringatan dini. Komunikasi publik diperkuat melalui penyampaian informasi harga dan pasokan, edukasi belanja bijak serta publikasi langkah pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi dan mencegah panic buying. HLM TPID dioptimalkan sebagai forum evaluasi dan pengambilan kebijakan strategis, disertai monitoring dan evaluasi pelaksanaan quick wins hingga kabupaten/kota agar kebijakan tepat sasaran, terukur dan berkelanjutan

link :
https://docs.google.com/document/d/1cInXvXJ5F--JMX5nFP5PiBtxToNFptfQ/edit?usp=drive_link&ouid=101083952107436321823&rtpof=true&sd=true